



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0025 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN PRIORITAS KELURAHAN LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN
PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
BARAT TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022, Kota Administrasi Jakarta Barat sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi fokus sejak tahun 2021;

b. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi yang konvergen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Penetapan Prioritas Kelurahan Lokasi Fokus Penurunan dan Pencegahan Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 4 ayat (1));

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Derah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
14. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
15. Keputusan Gubernur Nomor 578 Tahun 2021 Tentang Tim Konvergensi Pengendalian *Stunting* Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PRIORITAS KELURAHAN LOKASI FOKUS PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menyusun dan menetapkan 8 (Delapan) Kelurahan Lokus Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Penetapan prioritas kelurahan lokasi fokus (lokus) penurunan dan pencegahan terintegrasi tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU didasarkan pada indikator:

- a. prevalensi balita *stunting*;
- b. jumlah balita *stunting*;
- c. Jumlah keluarga berisiko *stunting*;
- d. dua cakupan layanan kesehatan Remaja, yaitu:
 - 1. cakupan remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD);
 - 2. cakupan remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin).
- e. tujuh cakupan layanan Calon Pengantin/Pasangan Usia Subur, yaitu :
 - 1. cakupan calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD);
 - 2. cakupan calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
 - 3. cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah;
 - 4. cakupan pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan *stunting*;
 - 5. cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat;
 - 6. cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai;
 - 7. cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.
- f. cakupan layanan kesehatan Ibu Hamil, yaitu:
 - 1. cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi;
 - 2. cakupan ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan;
 - 3. persentase *Unmet Need* pelayanan keluarga berencana;
 - 4. persentase Kehamilan yang tidak diinginkan.

g. cakupan layanan...

- g. cakupan layanan Anak dibawah usia lima tahun (Balita), yaitu:
 - 1. cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
 - 2. cakupan anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI);
 - 3. cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
 - 4. cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
 - 5. cakupan anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi;
 - 6. cakupan balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.
- h. cakupan layanan keluarga berisiko;
 - 1. cakupan keluarga yang Stop BABS;
 - 2. cakupan keluarga yang melaksanakan PHBS;
 - 3. cakupan keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri;
 - 4. cakupan pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan;
 - 5. cakupan keluarga berisiko *stunting* yang memperoleh pendampingan;
 - 6. cakupan keluarga berisiko *stunting* yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi.
- i. cakupan layanan air minum dan sanitasi, yaitu:
 - 1. cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak;
 - 2. cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak.
- j. cakupan layanan perlindungan sosial, yaitu:
 - 1. cakupan Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi;
 - 2. cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur.

- KETIGA : Lokasi pelaksanaan program/kegiatan penurunan dan pencegahan *stunting* di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat agar difokuskan kepada kelurahan lokus sesuai dengan urutan prioritas yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan penurunan dan pencegahan *stunting* di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat agar mengacu kepada Instruksi Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Intervensi Penurunan Dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kota Administrasi Jakarta Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, & Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan & Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Provinsi DKI Jakarta
14. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
15. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
16. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Barat
17. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
18. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
19. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat
20. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat
21. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0025 Tahun 2024
Tanggal 15 Februari 2024

KELURAHAN LOKASI FOKUS (LOKUS) INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2024

PRIORITAS	NAMA KELURAHAN	%PREVALENSI STUNTING	JUMLAH ANAK STUNTING	KETERANGAN
1	Kapuk	3,6	270	Lokus Lama
2	Cengkareng Barat	2,4	116	Lokus Lama
3	Kedaung Kaliangke	0,9	105	Lokus Lama
4	Duri Kosambi	3,3	79	Lokus Lama
5	Rawa Buaya	1,8	78	Lokus Lama
6	Tegal Alur	3	67	Lokus Lama
7	Jatipulo	0,6	55	Lokus Lama
8	Cengkareng Timur	2,7	40	Lokus Lama

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

